



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang di rubah dengan ketentuan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain, dan Staf Ahli Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang di rubah dengan



***Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023***

ketentuan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah.
- d. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah Provinsi;

b. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:

1. Biro Pemerintahan dan Kerjasama

Biro Pemerintahan dan Kerjasama merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerja sama, meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum sertamenyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

3. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek pelayanan dan pengembangan sosial, meliputi pelayanan sosial, penanggulangan masalah dan pemberdayaan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga sertamenyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai



***Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023***

Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

1. Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi

Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang bumd lembaga keuangan, bumd lembaga non keuangan dan investasi daerah yang menjadi kewenangan provinsi, serta menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratifbidangPerekonomian, meliputi kehutanan dan perkebunan, energi sumber daya mineral, sumber daya air, lingkungan hidup, tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, perencanaan dan ketatausahaan, bina marga tata ruang dan perhubungan, perumahan dan permukiman, industri perdagangan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Biro Pengadaan Barang /Jasa

Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang pengadaan Barang/jasa, dukungan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangan Provinsi, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

d. Asisten Administrasi, membawahkan:

1. Biro Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang organisasi, membantu Asisten Administrasi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi bidang organisasi meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan kinerja organisasi serta pengembangan pelayanan publik.

2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek humas dan protokol, meliputi pelayanan media dan informasi, publikasi, peliputan dan dokumentasi serta keprotokolan yang menjadi kewenangan Provinsi,



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

menyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

3. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang umum, meliputi rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian, perencanaan sekretariat daerah administrasi keuangan serta aset Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



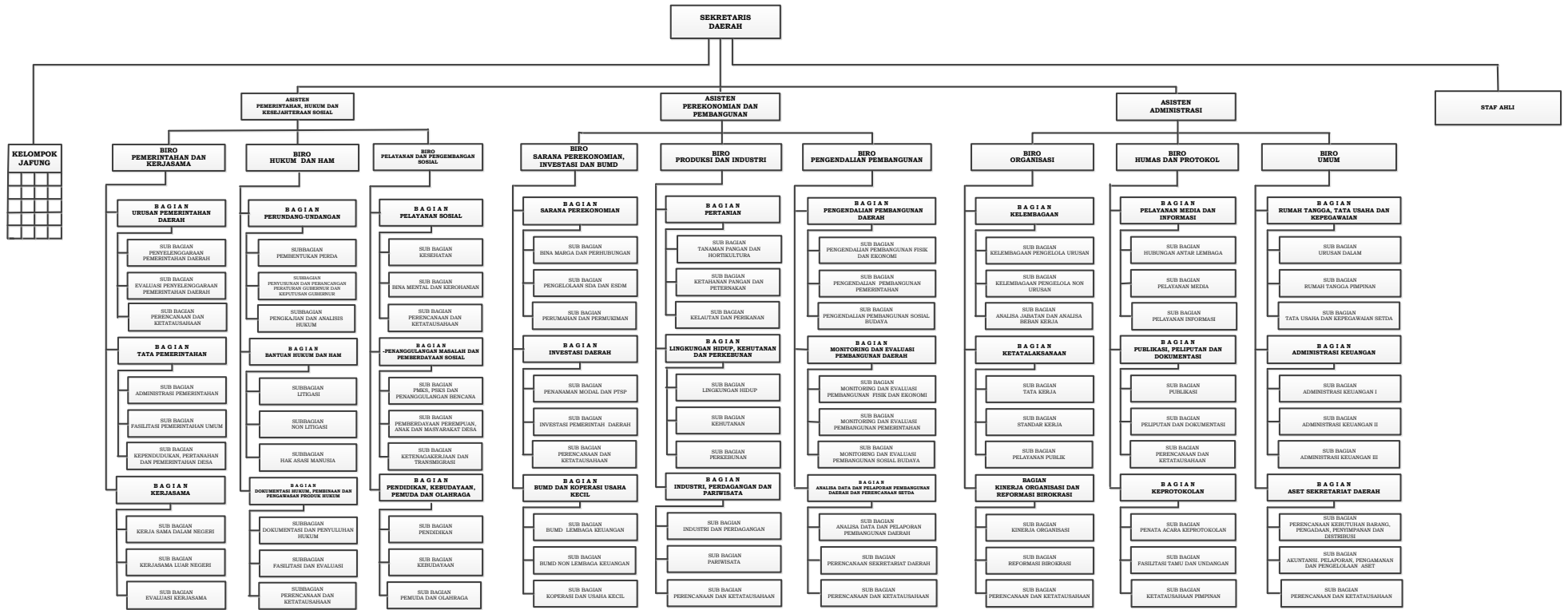
Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN



2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja secara lebih baik.

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki pegawai sebanyak 742 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga didapatkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu ; a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuanb dan sasaran organisasi; b) pola pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi; c) penerapan sistem manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Tabel. 2.1
Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode Desember 2018

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	LAKI - LAKI	531	
2	PEREMPUAN	211	
JUMLAH		742	



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

Tabel. 2.2
Data PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah
Berdasarkan Unit Kerja
Periode Desember 2018

NO.	NAMA UNIT KERJA	ESELON					JAFUNG	PELAKSANA	TOTAL
		I.b	II.a	II.b	III.a	IV.a			
1	Sekretariat Daerah	1						1	
2	Staff Ahli								
	- Bidang Hukum dan Politik		1					1	
	- Bidang Kemasyarakatan dan SDM		1					1	
	- Bidang Ekonomi dan Keuangan		1					1	
3	Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial		1					1	
	a. Biro Hukum dan HAM			1	3	9	38	51	
	b. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial			1	3	9	68	81	
	c. Biro Pemerintah dan Kerjasama			1	3	9	32	45	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1					1	
	a. Biro BUMD dan Investasi			1	3	9	1	43	
	b. Biro Perekonomian			1	3	9	32	45	
	c. Biro Pengadaan Barang/Jasa			1	3	9	38	51	
5	Asisten Administrasi			1				1	
	a. Biro Humas dan Protokol			1	3	9	5	119	
	b. Biro Organisasi			1	3	9	1	35	
	c. Biro Umum			1	3	9	2	256	
	JUMLAH	1	6	9	27	81	9	661	742

Tabel. 2.3
Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
Periode Desember 2018

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN TINGKAT GAJI	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	Pembina Utama	IV/e	1	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	6	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	5	
4	Pembina Tingkat I	IV/b	22	
5	Pembina	IV/a	40	
6	Penata Tingkat I	III/d	81	
7	Penata	III/c	129	
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	103	
9	Penata Muda	III/a	118	
10	Pengatur Tingkat I	II/d	17	
11	Pengatur	II/c	136	
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	19	
NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN	JUMLAH	KET.



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

		TINGKAT GAJI	PEGAWAI	
13	Pengatur Muda	II/a	42	
14	Juru Tingkat I	I/d	3	
15	Juru	I/c	16	
16	Juru Muda Tingkat I	I/b	1	
17	Juru Muda	I/a	3	
	JUMLAH		742	

Tabel. 2.4
Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Berdasarkan Pendidikan
Periode Desember 2018

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	STRATA 3 (S-3)	4	
2	STRATA 2 (S-2)	139	
3	STRATA 2 (S-1)	239	
4	DIPLOMA 4 (D-4)	31	
5	DIPLOMA 3 (D-3)	35	
6	DIPLOMA 2 (D-2)	1	
7	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	221	
8	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	35	
9	Sekolah Dasar (SD)	37	
	JUMLAH	742	

Tabel. 2.5
Profil Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Berdasarkan Kelompok Usia
Periode Desember 2018

NO.	KELOMPOK USIA	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	17 - 25 TAHUN	7	
2	26 - 30 TAHUN	27	
3	31 - 35 TAHUN	73	
4	36 - 40 TAHUN	114	
5	41 - 45 TAHUN	152	
6	46 - 50 TAHUN	148	
7	51 - 54 TAHUN	140	



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

NO.	KELOMPOK USIA	JUMLAH PEGAWAI	KET.
8	55 - 60 TAHUN	77	
9	61 - 65 TAHUN	4	
	JUMLAH	742	

Selain SDM, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan, pedoman kerja, serta kelembagaan (struktur organisasi) yang tertata merupakan faktor pendukung dalam capaian pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat Daerah. Hingga Tahun 2018, tanah Gedung Sate (Jl. Diponegoro no.22 Bandung) tercatat seluas 23,150 M², Berikut Rekapitulasi Barang Investasi Kantor;

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
1	1.3.2.02.01.	Sedan	Unit	Baik	26
2	1.3.2.02.05.	Micro Bus	Unit	Baik	96
3	1.3.2.02.12.	Sepeda Motor	Unit	Baik	126
4	1.3.2.02.12.	Bebek Matic 110 cc	Unit	Baik	30
5	1.3.2.02.12.	Bebek Matic 125 cc	Unit	Baik	16
6	1.3.2.02.12.	Motor Trail	Unit	Baik	11
7	1.3.2.02.12.	Scooter	Unit	Baik	5
8	1.3.2.09.01.	Mesin Ketik Manual 18"	Unit	Baik	28
9	1.3.2.09.01.	Mesin Ketik Manual Standar (14 - 16)	Unit	Baik	53
10	1.3.2.09.01.	Mesin Ketik Manual 27"	Buah	Baik	16
11	1.3.2.09.01.	Mesin Ketik Manual 12"	Buah	Baik	10



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
12	1.3.2.09.01.	Mesin Ketik Elektrik	Buah	Baik	3
13	1.3.2.09.02.	Mesin Hitung Elektronik	Unit	Baik	22
14	1.3.2.09.02.	Mesin Kalkulator	Buah	Baik	114
15	1.3.2.09.04.	Mesin Foto Copy	Buah	Baik	7
16	1.3.2.09.08.	Alat Pengancur Kertas	Buah	Baik	41
17	1.3.2.09.08.	Mesin Penghancur Kertas	Buah	Baik	10
18	1.3.2.10.02.	Lemari Besi/Metal	Buah	Baik	7
19	1.3.2.10.02.	Meja Kayu/Rotan	Buah	Baik	1
20	1.3.2.10.02.	Rak Kayu	Unit	Baik	5
21	1.3.2.10.02.	Lemari Kayu	Unit	Baik	7
22	1.3.2.10.02.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Buah	Baik	1
23	1.3.2.10.03.	Brankas	Buah	Baik	9
24	1.3.2.10.04.	Filling Besi/Metal	Buah	Baik	92
25	1.3.2.10.04.	Filling Cabinet	Unit	Baik	56
26	1.3.2.10.05.	White Board	Buah	Baik	17
27	1.3.2.10.10.	Peti Uang	Buah	Baik	5
28	1.3.2.11.02.	P.C. Unit	Unit	Baik	282
29	1.3.2.11.02.	PC	Unit	Baik	65
30	1.3.2.11.02.	Komputer PC	Unit	Baik	64
31	1.3.2.11.02.	Meja Komputer	Unit	Baik	7
32	1.3.2.11.03.	Note Book	Unit	Baik	141
33	1.3.2.11.03.	Laptop	Unit	Baik	10
34	1.3.2.11.04.	Printer	Unit	Baik	306
35	1.3.2.11.04.	Printer Dot Matrix	Unit	Baik	4
36	1.3.2.11.04.	Printer Inkjet	Unit	Baik	1
37	1.3.2.11.04.	Printer All In One	Unit	Baik	2
38	1.3.2.11.04.	Portable Printer	Unit	Baik	1
39	1.3.2.11.05.	Scanner	Unit	Baik	39



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
40	1.3.2.11.05.	Scanner Barcode	Unit	Baik	180
41	1.3.2.11.06.	Monitor	Unit	Baik	5
42	1.3.2.11.07.	CPU	Unit	Baik	5
43	1.3.2.11.09.	Floppy Disk Unit	Buah	Baik	87
44	1.3.2.11.09.	External Hard Disk	Buah	Baik	61
45	1.3.2.11.09.	Hard Disk	Unit	Baik	23
46	1.3.2.12.01.	Meja Kayu/Rotan	Stel	Baik	121
47	1.3.2.12.01.	Meja 1/2 biro	Buah	Baik	50
48	1.3.2.12.01.	Meja Kerja	Buah	Baik	73
49	1.3.2.12.01.	Meja Besi/Metal	Buah	Baik	4
50	1.3.2.12.02.	Meja Rapat	Buah	Baik	6
51	1.3.2.12.02.	Meja Kayu/Rotan	Unit	Baik	48
52	1.3.2.12.02.	Meja Rapat Besar	Buah	Baik	1
53	1.3.2.12.02.	Meja	Buah	Baik	6
54	1.3.2.12.04.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	Baik	38
55	1.3.2.12.04.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	Baik	40
56	1.3.2.12.04.	Kursi Kerja Pegawai Nin Struktural	Buah	Baik	7
57	1.3.2.12.04.	Kursi Besi/Metal	Buah	Baik	268
58	1.3.2.12.04.	Kursi Biasa	Buah	Baik	18
59	1.3.2.12.04.	Kursi Tangan	Buah	Baik	14
60	1.3.2.12.04.	Kursi Kerja	Buah	Baik	110
61	1.3.2.12.04.	Kursi	Buah	Baik	78
62	1.3.2.12.05.	Kursi Rapat	Buah	Baik	462
63	1.3.2.12.05.	Kursi Rapat Besar	Buah	Baik	56
64	1.3.2.12.08.	Sofa	Stel	Baik	27
65	1.3.2.12.08.	Zice	Stel	Baik	25
66	1.3.2.12.10.	Lemari Kayu	Unit	Baik	27
67	1.3.2.12.10.	Lemari Pakaian	Unit	Baik	22
68	1.3.2.12.10.	Meja Komputer	Buah	Baik	1



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
69	1.3.2.12.10.	Lemari Kaca	Buah	Baik	3
70	1.3.2.12.10.	Lemari Buku/Buffed	Buah	Baik	22
71	1.3.2.12.10.	Grandeza	Unit	Baik	4
72	1.3.2.12.10.	Rak Kayu	Buah	Baik	5
73	1.3.2.12.10.	Lemari Retracting	Buah	Baik	10
74	1.3.2.12.10.	Lemari Swing Door Combination	Buah	Baik	3
75	1.3.2.12.10.	Lemari Gantung	Unit	Baik	2
76	1.3.2.12.10.	Nacas	Buah	Baik	8
77	1.3.2.12.10.	Lemari	Buah	Baik	34
78	1.3.2.12.16.	Kursi Tamu	Buah	Baik	21
79	1.3.2.15.03.	Screen	Unit	Baik	15
80	1.3.2.15.03.	Proyektor	Unit	Baik	55
81	1.3.2.16.02.	Facsimile	Unit	Baik	41
82	1.09.01.01.02.	Jepp	Unit	Baik	7
83	1.09.01.02.03.	Mini Bus	Unit	Baik	2
84	1.09.01.03.02.	Pick Up	Unit	Baik	4
85	1.09.01.02.04.	Lain-lain Kendaraan	Unit	Baik	21
86	1.09.02.01.03.	Caravan	Unit	Baik	1

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat periode jangka menengah RENSTRA Tahun 2013-2018 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA tahun 2013-2018 menurut Indikator Kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7.



Tabel 2.7`

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2018

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Misi 1 : Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama, hukum dan hak asasi manusia																
1	Meningkatnya modernisasi dan sinkronisasi pemerintahan umum di Jawa Barat	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan umum	Akurasi data kependudukan	Persen	NA	70	74	76	80	85	70	74	76	80	85	
			Prosentase rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persen	NA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			Persentase Fasilitasi keanggotaan DPRD dan kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Rekomendasi penegasan batas daerah dan penetapan yang ditindaklanjuti dengan	Segmen	30	5	14	7	12	-	5	14	7	12	-	



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
									kebijakan						
			Prosentase inventarisasi indikator rupabumi unsur buatan di kabupaten/kota	Persen	NA	70	80	100	100	100	70	80	100	100	100
			Jumlah Rekomendasi permasalahan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban	Jumlah	NA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Jumlah Rekomendasi Penegasan dan Penetapan batas desa yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Desa Kab/Kota	NA	4 4	2 4	4 2	4 2	4 2	4 4	2 4	4 2	4 2	4 2
			Jumlah rekomendasi penataan ruang kawasan perdesaan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Desa Kab/Kota	NA	- 2	2 2	4 2	2 3	1 2	- 2	2 2	4 2	2 3	1 2
			Prosentase rekomendasi tukar menukar tanah kas desa yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Persen	NA	50	85	70	90	90	50	85	70	90	90



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						2.	Meningkatkan daya saing daerah	Terselenggaranya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi	Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pemeringkatan LPPD Provinsi	Peringkat	NA	4	3	2	1
		Terselenggaranya fasilitas dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Kota	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Provinsi	Persen	NA	35	45	60	70	80	35	45	60	70	80
		Terselenggaranya fasilitas dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Kota	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten Kota	Persen	NA	35	45	60	70	80	35	45	60	70	80
			Persentase kemampuan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persen	20	20	40	50	60	70	20	40	50	60	70
		Terbentuknya Dokumen Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama antar daerah, Kabupaten Kota, antar Provinsi, dan luar negeri	Dokumen	17	17	9	9	9	9	17	9	9	9	9
			Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM, Organisasi dalam dan luar negeri	Dokumen	33	33	13	13	13	13	33	13	13	13	13



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						3.	Meningkatkan kesadaran Hukum dan HAM melalui penyesuaian kebijakan dan implementasi yang berkeadilan	Meningkatnya keserasian produk hukum dan ketaatan terhadap hukum dan HAM	Jumlah produk hukum yang disusun, ditetapkan dan dievaluasi	Perda Pergub	NA	29 10	20 10	27 20	19 20
			Jumlah penyelesaian sengketa secara Non Litigasi	Kasus	NA	32	32	40	32	32	32	32	40	32	32
			Jumlah penanganan perkara perdata TUN dan HAM	Kasus	NA	32	35	15	15	15	32	35	15	15	15
		Meningkatnya Klarifikasi, Evaluasi dan Fasilitasi produk hukum Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda Kabupaten/Kota yang dievaluasi dan diklarifikasi	Dokumen	NA	180	180	185	180	180	180	180	185	180	180
		Meningkatnya sosialisasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan	Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum	Desa/Kel	NA	200	1001	975	800	750	200	1001	975	800	750
Misi 2 : Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian, Bina Produksi, dan Administrasi Pembangunan															
1.	Meningkatnya sinergitas pembangunan	Tersedianya bahan kebijakan umum bagi pembangunan	Jumlah Kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan	Dokumen	4	4	4	8	4	4	4	4	8	4	4



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	bidang perekonomian	sektor (pertanian, ketahanan pangan, kehutanan perkebunan, industri, perdagangan, koperasi UMKM, pariwisata, pekerjaan umum dan energi)	Jumlah Kebijakan bidang kehutanan dan perkebunan	Dokumen	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1
		Terjalannya hubungan yang sinergis dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, konsultasi bidang pertanian dan ketahanan pangan	Dokumen	4	4	4	1	4	4	4	4	1	4	4
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi, konsultasi bidang kehutanan dan perkebunan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Tersedianya data/informasi serta hasil evaluasi pembangunan sektor perekonomian	Jumlah hasil pemantauan, pembinaan bidang pertanian dan ketahanan pangan	Dokumen	4	4	4	1	4	4	4	4	1	4	4



Benstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
								(pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, industri, perdagangan, koperasi UMKM, pariwisata, pekerjaan umum dan energi)	Jumlah hasil pemantauan, pembinaan bidang kehutanan dan perkebunan	Dokumen	1	1	1	1	1
2.	Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan potensi ekonomi dan investasi	Terlaksananya kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) di Jawa Barat	Rumusan kebijakan penetapan Kawasan Industri yang diarahkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang – Bekasi	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Meningkatkan pengelolaan BUMD Provinsi Jawa Barat	Adanya peningkatan keberadaan BUMD yang berkontribusi terhadap PAD per tahun	Tersedianya rumusan kebijakan pengembangan BUMD primer dan BUMD non primer	Dokumen	NA	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
			Meningkatnya struktur usaha BUMD perbankan dan BUMD jasa keuangan	Dokumen	NA	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Meningkatnya pelayanan perijinan di Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penanaman modal di Jawa Barat	Dokumen harmonisasi kebijakan, Draft Pedoman SOP bidang perijinan dan penanaman modal, produk unggulan, promosi investasi di Jawa Barat, pemetaan dan kebijakan investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan investasi Pemerintah Daerah	Tersedianya bahan kebijakan di bidang investasi Pemerintah Daerah	Dokumen	NA	1	1	6	6	6	1	1	6	6	
4.	Meningkatkan investasi melalui alternatif pembiayaan	Terlaksananya persiapan obligasi daerah	Persiapan penerbitan obligasi daerah	Dokumen	NA	-	2	5	5	5	-	2	5	5	
5.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan	Ketersediaan draft Gubernur Bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah Rancangan Kebijakan Gubernur bidang Administrasi Pembangunan	Draft regulasi	9	12	15	17	19	21	12	15	17	19	
		Adanya kesesuaian rencana dengan realisasi anggaran	Deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana antara 0 sd - 5,99 % atau kategori hijau	Persen	-7.14	0 s.d. 5	0 s.d. 5	0 s.d. 5	0 s.d. 5	0 s.d. 5	0 s.d. 5	0 s.d. 5	0 s.d. 5	0 s.d. 5	0 s.d. 5



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
								Meningkatnya Prosentase Kepatuhan OPD/Biro dalam Pelaporan Kinerja	Prosentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu	Persen	80	82	85	90	92
		Meningkatnya Prosentase Kepatuhan Kabupaten/Kota dalam Pelaporan Kinerja	Prosentase Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan tepat waktu	Persen	75	77	80	85	90	95	77	80	85	90	95
Misi 3 : Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Sosial															
1.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan	Jumlah rancangan kebijakan dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan	Dokumen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Dokumen		2	3	2	3	3	2	3	2	3	3
			Persentase partisipasi masyarakat binaan yang mengikuti kegiatan lomba keagamaan	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase ketercukupan pemandu dan pemantau haji bagi jemaah haji di Jawa	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
									Barat						
		Terfasilitasinya pelayanan kepada lembaga/organisasi sosial keagamaan	Jumlah rancangan kebijakan dalam upaya pelayanan kepada lembaga/ organisasi sosial keagamaan	Persen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen		75	75	75	75	75	75	75	75	75	
			Persentase organisasi/lembaga sosial keagamaan binaan yang berperan aktif dalam kegiatan keagamaan	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase bantuan sarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang dimanfaatkan	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat Jawa Barat	Terfasilitasinya Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan	Jumlah rancangan kebijakan di bidang kesehatan	Dokumen		8	5	5	5	5	8	5	5	5	
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Dokumen		5	3	5	4	4	5	3	5	4	4



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3.	Peningkatan upaya mutu pendidikan	Terfasilitasinya upaya peningkatan kualitas pendidikan	Jumlah rancangan kebijakan di bidang pendidikan	Dokumen		2	2	2	3	3	2	2	2	3	3
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Dokumen		1	2	2	3	3	1	2	2	3	3
4.	Meningkatkan potensi budaya lokal melalui pemberdayaan dan pelestarian budaya	Terfasilitasinya dukungan pelestarian seni dan budaya berbasis kearifan lokal	Jumlah rancangan kebijakan di bidang kebudayaan	Dokumen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Dokumen		1	2	2	5	5	1	2	2	5	5
5.	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan dan melestarikan sumber daya alam	Terfasilitasinya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah rancangan kebijakan di bidang lingkungan hidup	Dokumen		2	2	2	3	4	2	2	2	3	4
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Dokumen		1	4	4	6	6	1	4	4	6	6



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						6.	Pemerataan persebaran penduduk dan keseimbangan tenaga kerja	Meningkatnya kualitas penempatan transmigran asal Jawa Barat (tepat seleksi, tepat jumlah, tepat alokasi) melalui pelaksanaan kerjasama antar daerah di bidang ketransmigrasian	Jumlah MoU Gubernur	MoU	NA	7	10	8	9
		Terwujudnya perlindungan sosial semesta bagi tenaga kerja dan seluruh masyarakat	Prosentase tenaga kerja yang telah terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	NA	30	35	35	50	60	30	35	35	50	60
		Meningkatnya etos kerja dan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan melalui pemberian apresiasi terhadap tenaga kerja dan perusahaan berprestasi	Jumlah penghargaan kepada tenaga kerja		NA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			Jumlah penghargaan kepada perusahaan/unit kerja (Nakerwan/Zerro accident, SMK3)	Perusahaan	NA	50	60	50	70	75	50	60	50	70	75



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
									Jumlah penghargaan kepada lembaga ketenagakerjaan (LKS Tripartit, LKS Bipartit, Dewan Pengupahan, Tim KF Jamsostek)		NA	12	12	12	12
7	Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penanganan PMKS untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Prosentase penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persen	NA	25	30	20	45	50	25	30	20	45	50
		Menurunnya angka korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah petugas penyuluh P4GN yang dilatih	Orang	NA	3000	3500	3500	4500	5000	3000	3500	3500	4500	5000
8.	Mendorong kreativitas para pencipta dan menjamin perlindungan hak cipta	Meningkatnya apresiasi dan perlindungan HAKI terhadap prestasi, kreativitas dan karya cipta	Jumlah inovasi/prakarsa masyarakat yang teridentifikasi	Orang	NA	112	253	220	220	220	112	253	220	220	220
		pemuda/pelajar dan masyarakat di berbagai bidang	Jumlah penghargaan anugerah inovasi dan anugerah prakarsa Jawa Barat	Orang	NA	20	20	30	20	20	20	20	30	20	20
			Jumlah inovasi masyarakat yang akan difasilitasi HAKI	Sertifikat	NA	5	5	10	5	5	5	5	10	5	5



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan Gender diseluruh kalangan masyarakat, serta penguatan peran dan perlindungan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Jumlah ekonomi perempuan yang lebih mandiri	Kelompok	NA	35	40	10	60	70	35	40	10	60	70
9.	Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana	Meningkatnya kewaspadaan aparatur masyarakat dan generasi muda dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana di Jawa Barat	Prosentase penanggulangan bencana yang tertangani	Persen	NA	25	30	30	40	50	25	30	30	40	50
10.	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap makna peringatan hari-hari besar	Jumlah peringatan hari besar yang menjadi ikon	Kegiatan	NA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Meningkatnya pemahaman dan tumbuhnya apresiasi masyarakat terhadap jasa-jasa dan nilai-	Jumlah tokoh/lembaga organisasi di Jawa Barat yang diangkat menjadi pahlawan nasional	Orang	NA	-	2	1	2	2	-	2	1	2	2



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
								nilai kejuangan para pahlawan							
			Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pembinaan, pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan	Orang	NA	54	250	135	750	1000	54	250	135	750	1000
Misi 4 : Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Keuangan Daerah, Organisasi, dan Pengelolaan Barang															
1.	Terselenggaranya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah	a. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Regulasi:											
				Perda	-	5	-	-	5	-	5	-	-	5	-
				Pergub	-	-	31	-	46	34	-	31	-	46	34
				Kepgub	7	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
			b. Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi	Persen	100	100	93.61	100	100	100	100	93.61	100	100	100
2.	Mengembangkan dan Meningkatkan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik	a. Jumlah unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi	Unit Pelayanan Publik	6	-	12	14	16	18	-	12	14	16	18
			b. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria	OPD	-	-	2	4	5	6	-	2	4	5	6



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
									Nasional							
		2. Meningkatnya Standarisasi Kerja Organisasi	Prosentase OPD yang melaksanakan Standarisasi Kerja Organisasi	Persen	72	76	80	85	87	90	76	80	85	87	90	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan kinerja OPD	a. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	Nilai	CC	B	A	A	A	AA	B	A	A	A	AA	
			b. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC keatas	Persen	80	85.72	87	90	95	100	85.72	87	90	95	100	
		Penyusunan sistem, kebijakan dan prosedur penyusunan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif secara tepat waktu dengan memperhitungkan azas keadilan dan kepatutan	Jumlah pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat yang tertata dengan baik	Kab/Kota	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
				Provinsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				OPD	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
				Biro	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Prosentase implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Tingkat kecocokan rekonsiliasi keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Meningkatnya kecepatan, akurasi pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Prosentase SP2D yang di terbitkan tepat waktu	Persen		98	76	95	95	96	98	76	95	95	96
			Keputusan Gubernur hasil evaluasi P2 APBD	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			PERDA APBD atau APBDP Provinsi Jawa Barat	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			PERDA Pertanggungjawaban APBDP Provinsi Jawa Barat	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Tingkat pemenuhan opini WTP dari Auditor Independen atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat.	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			- Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			- Laporan Keuangan Setda Jabar	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah OPD yang direkonsiliasi	Dokumen		2	1	1	1	1	2	1	1	1	1
		Terwujudnya pendistribusian barang yang tepat sasaran	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Tersedianya data yang akurat untuk penyusunan bahan kebijakan lebih lanjut	Ketersediaan dokumen operasional	Dokumen		2	2	5	5	6	2	2	5	5	6
			Pengadaan lahan	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pengamanan dan pensertifikatan	Persen		65	67	70	71	73	65	67	70	71	73
4.	Meningkatkan produktivitas melalui pengembangan sumber daya manusia dalam mencapai sasaran program dan tujuan organisasi	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan menuju Jabar Juara	Persentase prestasi yang berhasil diraih oleh marching band Gita Pakuan	Persen				100					100		
		Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah Daerah	Persentase PNS yang mendapat pendidikan dan pelatihan tekhnis.	Persen	18	75	80	100	100	100	75	80	100	100	100
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis komunikasi organisasi	Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat dan Stakeholders pembangunan	Persentase berita di media massa yang termonitor.	Persen	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
			Persentase program dan kebijakan pemprov Jabar yang	Persen	87,48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
									tersosialisasi melalui media cetak						
			Persentase program dan kebijakan pemprov Jabar yang tersosialisasi melalui media elektronik	persen	87.48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase program dan kebijakan pemprov Jabar yang tersosialisasi melalui media luar ruang	persen	87.48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya peran serta masyarakat	Persentase peserta pameran	persen	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	
		Meningkatnya koleksi buku perpustakaan	Bertambahnya koleksi dan jumlah buku.	persen	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan secara proposional dalam perumusan kebijakan umum meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perumusan dan penyelenggaran kebijakan strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan;
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama daerah dan luar negeri;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang pertumbuhan perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan strategis;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan akuntabel dan berkeadilan;
7. Mengembangkan ekonomi kreatif dan membina BUMD;
8. Mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama;
9. Menata Produk hukum daerah;
10. Meningkatkan budaya taat hukum;



***Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023***

11. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik kebutuhan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Untuk anggaran melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Sumber Daya Keuangan pelaksanaan merupakan salah satu faktor yang menentukan disamping Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. Anggaran dan Realisasi pendanaan adalah sebagai berikut :



***Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023***



Tabel 2.8

**REKAPITULASI ANGGARAN REALISASI PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2014 - 2018**

TAHUN		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			SILPA	%
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		
2014	Anggaran	211.344.266.271,97	14.403.222.000,00	355.211.281.079,00	525.607.113.470,00		
	Realisasi	137.106.496.329,00	12.118.958.000,00	274.000.345.145,00	317.226.297.543,00	346.113.785.803,97	68,15
2015	Anggaran	196.131.870.964,12	10.277.739.369,00	351.941.437.682,00	667.223.718.798,00		
	Realisasi	154.298.634.912,00	7.808.981.000,00	298.349.067.584,00	573.213.140.776,00	191.904.942.541,12	84,34
2016	Anggaran	233.457.703.005,00	9.601.847.316,00	358.393.244.651,00	921.013.816.171,00		
	Realisasi	156.685.462.902,00	6.934.111.000,00	326.364.419.550,00	774.416.834.632,00	258.065.783.059,00	83,05
2017	Anggaran	99.818.080.848,00	3.190.800.000,00	247.505.659.780,00	32.963.202.604,00		
	Realisasi	99.241.029.924,00	2.670.500.000,00	234.093.266.802,00	29.749.353.328,00	17.723.573.178,00	95,38
2018	Anggaran	107.576.659.911,00	3.629.093.400,00	276.028.320.584,00	11.008.314.000,00		
	Realisasi	105.630.791.582,00	2.922.503.400,00	256.376.869.541,00	10.656.322.245,00	22.655.901.127,00	94,31